KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Beda sikap dengan pemerintah di RUU Pemilu, PAN tolak tudingan membangkang
Tanggal : Sabtu, 22 Juli 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 2

:: BEDA SIKAP DENGAN PEMERINTAH DI RUU PEMILU

PAN Tolak Tudingan Membangkang

PARTAI Amanat Nasional (PAN) kembali menjadi sorotan lantaran melakukan aksi *walk out* sesaat menjelang pengambilan keputusan RUU Pemilu di DPR pada Jumat (21/7) dini hari. PAN dinilai tidak mendukung kebijakan pemerintah yang mendukung opsi Paket A RUU Pemilu yang di dalamnya mengatur angka ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) 20-25%.

Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno membantah tudingan pihaknya membangkang dari partai pendukung pemerintah. Menurutnya aksi *walkout* oleh anggota Fraksi PAN masih dalam koridor komunikasi dengan partai pendukung pemerintah.

"Ada titik temu yang ingin kita capai agar kita tetap bisa mengusung isu-isu yang kita kehendaki, tetapi juga sejalan dengan apa yang dikehendaki pemerintah," kata dia.

Saat pandangan umum fraksi, Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menyatakan partainya meminta agar ambang batas pencalonan presiden dimusyawarahkan untuk mencari titik temu antara kubu parpol pendukung Paket A dengan kubu pendukung Paket B (*presidential threshold* 0%). Atas dasar itu, PAN meminta angka 10% sebagai jalan tengah. Hal tersebut diklaim juga sudah dikomunikasikan dengan parpol pendukung pemerintah. Eddy juga menyebut keputusan *walk out* atas inisiatif fraksi, bukan instruksi DPP.

"Kaminggak (membangkang), kami selalu komunikasi dengan parpol pendukung pemerintah," kata Eddy, kemarin.

Dalam RUU Pemilu yang telah diputuskan itu, pemerintah bersama partai koalisi pendukung memilih opsi Paket A. Opsi meliputi *presidential threshold* 20-25%, *parliamentary threshold* 4%, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per dapil 3-10, dan metode konversi suara *sainte-lague* murni. Menolak voting atas pasal krusial tersebut, Fraksi PAN bersama PKS, Gerindra, dan Demokrat memilih *walkout*.

Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan kemungkinan evaluasi terhadap PAN setelah pengesahan RUU Pemilu. Meskipun tidak secara tegas menjelaskan soal evaluasi, tapi Jokowi menyebut sehari sebelum paripurna DPR, PAN sebenarnya telah menyampaikan akan mendukung setiap keputusan yang diambil pemerintah.

"Untuk PAN supaya diketahui sehari sebelumnya sudah bertemu dengan saya. Dan sudah menyampaikan kepada saya untuk mendukung (keputusan pemerintah dalam RUU Pemilu)," kata Jokowi seusai menghadiri Mukernas II PPP di Ancol, Jakarta Utara, kemarin.

Salah satu evaluasi yang diduga dilakukan Jokowi terhadap PAN adalah mencopot menterinya di Kabinet Kerja saat *reshuffle*. Sebelumnya, sejumlah partai pendukung pemerintah, terutama PDI Perjuangan (PDIP), mendorong ini dilakukan. Namun, Jokowi dinilai tidak mudah mendepak menteri PAN meskipun perombakan kabinet dilakukan.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio mengatakan, setidaknya ada dua hal yang membuat PAN penting untuk tetap menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. *Pertama*, PAN memiliki basis dukungan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia. *Kedua*, PAN sebagai parpol terakhir yang bergabung ke Istana bisa menjadi jembatan penghubung pemerintah dengan parpol yang saat ini masih menjadi oposisi.


DOKUMEN SINDO

EDDY SOEPARNO
Sekjen DPP PAN

"Hal tak kalah penting, PAN bisa membuka jalur komunikasi dengan partai oposisi karena latar belakang PAN yang sebelumnya pernah menjadi oposisi," ujarnya.

Di sisi lain, ketika dicoret dari barisan koalisi, PAN justru akan bergabung kembali dengan koalisi lamanya, yakni PKS, Partai Gerindra, termasuk Partai Demokrat. "Justru kalau PAN lepas, Jokowi juga yang akhirnya rugi," kata dia.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai sikap PAN yang sudah tidak sejalan dengan usulan pemerintah menunjukkan sudah tidak ada kerja sama dengan partai-partai pendukung pemerintah. Menurutnya sudah sewajarnya PAN mengundurkan diri dari koalisi. "Sehingga tanpa dimintapun PAN sendirinya yang sudah mengambil keputusan tersebut," kata Andreas kemarin.

kiswondari/ sindonews/okezone